

MENUJU VNR SDGs INDONESIA 2021 YANG LEBIH RIGOROUS DAN EVIDENCE BASED

Paragraf 74 dokumen Agenda 2030 mengenai *“follow-up and review processes”* untuk implementasi Agenda 2030 pada huruf g menyatakan:

“They will be rigorous and based on evidence, informed by country-led evaluations and data which is high-quality, accessible, timely, reliable and disaggregated by income, sex, age, race, ethnicity, migration status, disability and geographic location and other characteristics relevant in national contexts”.

Dalam kerangka mendukung proses follow-up and review tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan RI terpanggil untuk memenuhi permintaan Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dalam untuk melakukan review atas penyusunan VNR SDGs 2021 Indonesia sebelum disampaikan kepada HLPF.

Review BPK ini menjadi kontribusi nyata terhadap pencapaian Agenda 2030 agar berdampak tidak hanya untuk kepentingan nasional melainkan juga pembelajaran bagi dunia internasional. Untuk itu, BPK bersama pemerintah sepakat menggunakan kriteria dalam review BNR SDG 2021. Kerangka kriteria tersebut meliputi tiga cakupan diantaranya (i) konsistensi SDGs 2021 dengan VNR SDGs 2017 dan 2019, validasi data dan analisa VNR SDG 2021 dengan hasil pemeriksaan BPK, serta keselarasan *due process* dengan *Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition*.

Hasil rewiu terhadap VNR SDGIndonesia 2021 menunjukkan bahwa pemerintah telah menjaga kesinambungan dan keselarasan pengungkapan informasi dan analisis sesuai dengan VNR SDGs 2017 dan 2019 serta *Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition*. Namun demikian, pemerintah perlu tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya serta relevansi data dan informasi, hasil dan tindak lanjut pemeriksaan BPK serta *due process* yang sesuai dengan *Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition*.

Untuk meningkatkan nilai tambah VNR SDGs 2021, BPK merekomendasikan kepada pemerintah agar memastikan pengungkapan keberlanjutan sumber daya serta relevansi data dan informasi, mengungkapkan pentingnya keselarasan informasi dan analisis masing-masing capaian tujuan dan target dengan hasil dan tindak lanjut pemeriksaan BPK, dan menjaga proses penyusunan VNR SDGs 2021 dengan tetap memperhatikan proses penyusunan, kerangka penyajian, dan pendokumentasiannya.

BPK mengapresiasi permintaan rewiu VNR sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penyusunan VNR SDGs Indonesia dalam mendukung *Agenda 2030* sekaligus bagian dari komitmen dan pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. BPK mngharapkan rewiu VNR SDGs 2021 menjadi langkah awal dari kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah dan lembaga pemeriksa dalam memperkuat VNR SDGs Indonesia kedepan dan menjadi *best practices* bagi negara-negara dan badan pemeriksa negara lain.

Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memberikan tanggapan positif atas hasil review. Sebagai Langkah nyata, Pemerintah segera menindak lanjuti hasil dan rekomendasi rewiu BPK dalam penyempurnaan dokumen akhir VNR SDG 2021 Indonesia. BPK dan Pemerintah sepakat untuk meningkatkan kolaborasi yang konstruktif kedepannya untuk menguatkan proses follow-up dan review Implementasi Agenda 2030.

